



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2020/Periodik - 2019)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**UNIT KERJA** : DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
**SUB UNIT KERJA** : BALAI PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **TOTOK WURYANTO**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI KEPELATIHAN**
3. NHK : **400248**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.450.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 444 m <sup>2</sup> /172 m <sup>2</sup> di KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 293 m <sup>2</sup> /170 m <sup>2</sup> di KOTA SEMARANG , WARISAN Rp. 700.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>138.500.000</b>
1. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.55/F700RE Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000		
2. MOTOR, HONDA NC11D1D A/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000		
3. MOTOR, HONDA NC110A1C A/T Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.813.000</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
Sub Total	<b>Rp.</b>	<b>1.592.313.000</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>236.000.000</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.356.313.000</b>

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkp.kpk.go.id](http://elhkp.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkp.kpk.go.id](http://elhkp.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **18 Februari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.